

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata memiliki peran yang besar dalam pembangunan nasional, karena selain menghasilkan pendapatan daerah, pariwisata juga sekaligus sebagai penghasil devisa negara. Sektor pariwisata berkaitan erat dengan penanaman modal asing, termasuk mereka yang berhubungan bisnis dengan Indonesia. Daya tarik pariwisata juga sudah tentu berbeda-beda di setiap daerah, sehingga wisatawan mempunyai begitu banyak tempat tujuan dengan beranekaragam khas yang mereka inginkan (Subagyo, 2012; Michopoulou, 2013; Rani, 2014; Zaenuri, 2015).

Sejalan dengan itu Pendit (1990) juga mengatakan bahwa “pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, pengangkutan serta mendorong pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sarana budaya, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya yang dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupaun wisatawan dari luar”.

Pemerintah Indonesia menargetkan sektor pariwisata pada tahun 2019 mendatang akan mampu mendatangkan 20 juta turis asing atau wisatawan mancanegara serta wisatawan nusantara sebesar 275 juta orang. Selain itu pada sektor pariwisata pada tahun 2019 juga ditargetkan mampu memberikan

kontribusi pada PDB nasional 15% dengan devisa sebesar Rp 260 Triliun, serta sektor pariwisata mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 12,6 juta orang. Serta indeks daya saing pariwisata berada pada peringkat 30 dunia.

Tabel 1.1
Target Kinerja Kementerian Pariwisata 2019

| Indikator | 2019 |
|------------------------------|------|
| Kontribusi PDB Nasional (%) | 15 |
| Devisa (Triliun Rupiah) | 260* |
| Jumlah Tenaga Kerja (Orang) | 13 |
| Indeks Daya Saing (WEF) | 30 |
| Wisatawan Mancanegara (Juta) | 20 |
| Wisatawan Nusantara (Juta) | 275 |

*) Kurs Tengah Bank Indonesia

Sumber :Kementerian Pariwisata, 2015.

Target kinerja pariwisata yang telah dicanangkan oleh kementerian pariwisata diatas menunjukkan harus adanya kerja keras dari setiap pemerintah baik di tingkat provinsi maupun daerah untuk menumbuh kembangkan pariwisata yang telah ada. Hal tersebut bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah yang bersangkutan, melainkan harus adanya kerjasama, baik itu dari masyarakat ataupun swasta.

Industri pariwisata menghasilkan produk dan jasa yang ditujukan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Zaenuri, 2012). Lebih lanjut, Zaenuri juga mengatakan bahwa “pariwisata juga merujuk pada berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Beberapa contoh penggunaan kata Pariwisata pada penggunaan sehari-hari antara lain: Produk Pariwisata (*Tourism Product*), Destinasi Pariwisata (*Tourism*

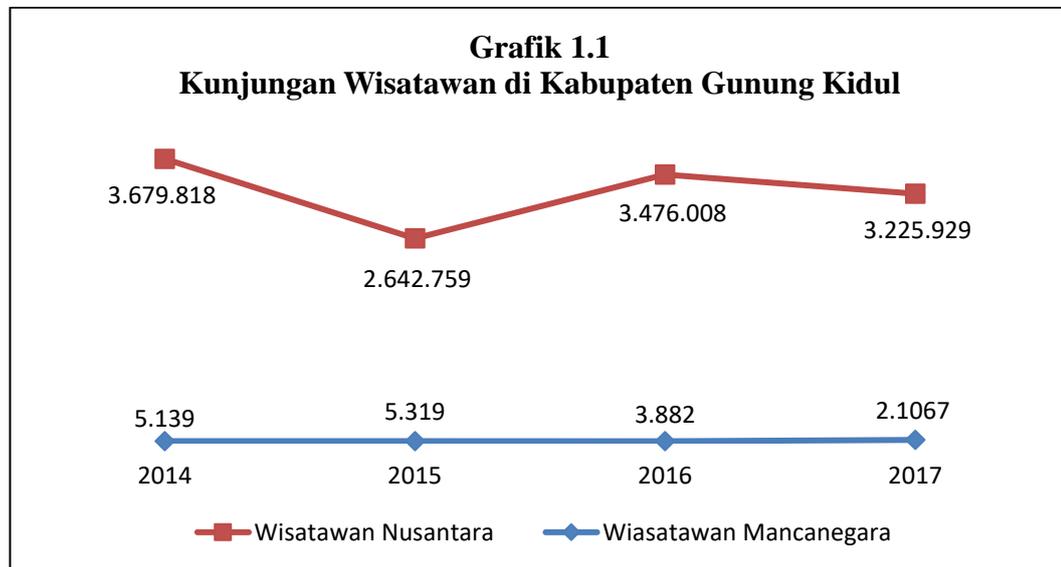
Destination), Industri Pariwisata (*Tourism Industry*), Pariwisata Perkotaan (*Urban Tourism*), Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*), Atraksi Pariwisata (*Tourism Attraction*)”.

Dewasa ini tuntutan pekerjaan semakin membuat individu merasakan kelelahan akibat jadwal yang begitu padat, sehingga mereka perlu meluangkan sedikit waktu untuk beristirahat atau pergi ke suatu tempat untuk melepaskan penat yang mereka alami. Sehingga Fandeli (1995), menyebutkan faktor yang mendorong manusia berwisata adalah:

1. Keinginan untuk melepaskan diri dari tekanan hidup sehari-hari di kota, keinginan untuk mengubah suasana dan memanfaatkan waktu senggang,
2. Kemajuan pembangunan dalam bidang komunikasi dan transportasi,
3. Keinginan untuk melihat dan memperoleh pengalaman-pengalaman baru mengenai budaya masyarakat dan di tempat lain,
4. Meningkatnya pendapatan yang dapat memungkinkan seseorang dapat dengan bebas melakukan perjalanan yang jauh dari tempat tinggalnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat menjadi DIY merupakan salah satu provinsi yang begitu banyak tujuan wisata dan juga merupakan salah satu provinsi yang sangat memperhatikan obyek wisata yang terdapat di daerah-daerah termasuk di pedesaan sehingga disetiap kabupaten dan kota begitu terjaga keunikan pariwisatanya, tak terkecuali Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu kabupaten yang berada di wilayah (DIY) mempunyai destinasi wisata yang sangat menarik dan meraih penghargaan dalam dalam konteks pariwisata berkelanjutan di tingkat internasional pada awal tahun 2018 (gunungapipurba.com, 2018). Walaupun pada kenyataannya jumlah kunjungan

masih belum stabil disetiap tahunnya.Hal itu terlihat dalam Laporan Statistik Kepariwisataaan Tahun 2017.



Sumber: Statistik Kepariwisataaan DIY 2017

Grafik diatas menunjukkan bahwa masih belum stabilnya jumlah wisatawan baik wisatawan yang berasal nusantara maupun mancanegara.Namun hal tersebut juga harus dipahami bahwa tujuan pariwisata yang sangat menarik untuk dikunjungi adalah pariwisata yang memperhatikan objek dan daya tarik wisata (ODTW) bukan hanya dilihat dari internal namun juga external terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata tertentu (Hadiwijoyo, 2012).

Untuk meningkatkan pengembangan pariwisata diseluruh kabupaten dan kota, pemerintah Provinsi DIY melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 terdapat sasaran pembangunan atau pengembangan dari

pariwisata itu sendiri untuk meningkatkan perhatian serta pelayanan di tempat wisata.

Tabel 1.2
Pengembangan Pariwisata

| No | Poin yang harus diperhatikan |
|----|---|
| 1. | Terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata |
| 2 | Tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal |
| 3 | Meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif , yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku Wisata |
| 4 | Meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara |
| 5 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah |
| 6 | Terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah |
| 7 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan |
| 8 | Meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan |
| 9 | Terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata |
| 10 | Terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat |
| 11 | Terwujudnya lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien |
| 12 | Terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah |
| 13 | Terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional |
| 14 | Terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona |

Sumber: Perda DIY No 1 Tahun 2012

Terkait dengan pengembangan pariwisata yang tidak hanya berfokus pada Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) tetapi juga terhadap sarana dan prasarana yang merupakan salah satu hal penting yang juga perlu mendapat perhatian

khusus. Hal itu dikarenakan wisatawan yang berkunjung bukan hanya dari penduduk lokal tetapi hampir seluruh nusantara bahkan mancanegara. Seperti yang dikatakan oleh Zaenuri (2012) bahwa daya tarik wisata juga didukung dengan fasilitas agar dapat meningkatkan minat dan loyalitas wisatawan. Dalam hal ini Kabupaten Gunung Kidul juga dirasa sudah sedikit memperhatikan akan hal tersebut, itu dibuktikan dengan rekap data kepariwisataanya.

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana
Pengembangan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul

| No | Jenis Usaha | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|------------------------|------|------|------|
| 1 | Biro Perjalanan/Wisata | 18 | 21 | 21 |
| 2 | Agen Perjalanan Wisata | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Rumah Makan | 620 | 719 | 785 |
| 4 | Pramuwisata | 800 | 860 | 870 |
| 5 | Gedung Pertemuan | 44 | 51 | 51 |
| 6 | Industri Kerajinan | 45 | 54 | 54 |
| 7 | Group Kesenian | 206 | 206 | 206 |
| 8 | Desa Wisata | 17 | 17 | 17 |

Sumber: Statistik Kepariwisataaan DIY 2017

Salah satu desa yang menjadi pusat perhatian di Kabupaten Gunung Kidul adalah Desa Ngalnggeran, hal itu dikarenakan desa tersebut merupakan sebuah desa wisata yang memiliki beberapa obyek tujuan wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi, diantaranya adalah Gunung Api Purba, Embung Nglanggeran, Air Terjun Kedung Kandang dan Griya Coklat Nglanggeran (gunungapipurba.com, 2018).

Desa Ngalanggeran menjadi begitu fenomenal dan berkembang begitu pesat setelah adanya sebuah kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang di bentuk pada tahun 2003. Terbentuknya sebuah komunitas yang sadar akan pentingnya pengelolaan pariwisata di desa Ngalnggeran ini juga sangat diharapkan bisa memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan desa. Salah satu harapan dari adanya komunitas tersebut adalah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Maka dari itu, pengelola desa Ngalnggeran bekerjasama dengan seluruh masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pengembangan pariwisata yang optimal untuk keberhasilan pariwisata itu sendiri. Beberapa hal yang memang telah dilakukan oleh pengelola, yaitu (Hermawan: 2016):

1. Pembangunan fisik kawasan ekowisata Gunung Api Purba, Embung Ngalnggeran dan Kebun Buah Ngalnggeran sebagai daya tarik wisata utama di Desa Ngalnggeran serta pemetaan ulang kawasan,
2. Pembangunan infrastruktur pendukung sekitar, seperti jalan, area parkir, tempat ibadah, dan lain sebagainya,
3. Pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengembangan kebudayaan lokal, pelatihan wirausaha, dan lain-lain.

Selanjutnya, desa Ngalnggeran merupakan salah satu contoh desa yang menerapkan praktek terbaik melalui Pokdarwis tersebut sehingga sangat menarik untuk dijadikan bahan kajian. Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa Ngalnggeran saling berbaur untuk mensukseskan pariwisata yang ada di desa Ngalnggeran tersebut. Dalam hal ini desa Ngalnggeran dikelola langsung oleh Pokdarwis yang bekerjasama dengan Karang Taruna Putri Mandiri Desa Ngalnggeran. Kelompok-kelompok masyarakat yang ikut tergabung diantaranya adalah kelompok tani yang memang dikhususkan untuk mengelola daya tarik

wisata dibidang pertanian dan perkebunan dengan cara memberikan edukasi kepada wisatawan yang berkunjung, bagaimana tata cara menanam padi dan tumbuhan lainnya. Begitu juga halnya dengan kelompok peternak, kelompok kesenian dan budaya dan juga Tim Pembina Kesejahteraan Keluarga (TPKK) yang mempunyai tugas masing-masing untuk melayani wisatawan yang berkunjung. Karena pada dasarnya keterlibatan masyarakat secara penuh yang dapat maendorong pengembangan pariwisata di daerah tertentu (Sunaryo, 2013; Raharjana, 2012; Adisasmita, 2006).

Dengan menampilkan keindahan alam yang begitu memukau menjadikan Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan penghargaan menjadi Desa Wisata terbaik dalam ajang ASTA (*ASEAN Sustainable Tourism Award*) di Chiang Mai, Thailand. Sebelumnya Desa Wisata Nglanggeran juga menang sebagai salah satu Desa Wisata Terbaik ASEAN tahun 2017. Sehingga Desa Wisata Nglanggeran sudah sangat dikenal dan menjadi salah satu tempat yang begitu direkomendasikan untuk tujuan pariwisata (gunungapipurba.com, 2018).

Bukan untuk pertama kalinya Desa Nglanggeran mendapatkan penghargaan sebagai tujuan wisata yang sangat bagus untuk dikunjungi. Terdapat beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Desa Nglanggeran sebagai bukti kerjasama yang baik antara *stakeholder-stakeholder* dalam pengembangan desa tersebut.

Tabel 1.4
Penghargaan yang diperoleh Desa Nglanggeran

| No | Jenis Penghargaan | Penjelasan |
|----|--|---|
| 1 | Penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI | Salah satu pemuda pengelola Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba (Sugeng Handoko) menjadi pemuda pelopor bidang Senibudaya dan Pariwisata Tahun 2011 Tingkat Nasional |
| 2 | Penghargaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI | Diberikan kepada pengelola Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba sebagai finalis dalam acara Cipta Award 2011 dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam berwawasan Lingkungan Tingkat Nasional. |
| 3 | Penghargaan dari Java Promo | Diberikan kepada Pengelola Kawasan EKowisata Gunung Api Purba sebagai juara II lomba Desa Wisata oleh Java Promo |
| 4 | Penghargaan dari Kementerian BUMN | Diberikan kepada salah satu kelompok pemuda pengelola wisata sebagai <i>Social Entrepreneur</i> Lomba Mandiri Bersama Mandiri yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri Tahun 2012 |
| 5 | Penghargaan dari BKSDA D.I. Yogyakarta | Diberikan kepada salah satu anggota Pokdarwis (Sugeng Handoko) sebagai Juara I Kader Konservasi Tingkat Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013 |
| 6 | Penghargaan dari Kementerian Kehutanan RI | Diberikan kepada salah satu anggota Pokdarwis (Sugeng Handoko) sebagai Juara Harapan III Kader Konservasi Tingkat Nasional Tahun 2013 |
| 7 | Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI | Diberikan kepada Pokdarwis Desa Wisata Nglanggeran sebagai Juara II Pokdawis Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013 |
| 8 | Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI | Diberikan kepada Pokdarwis Desa Wisata Nglanggeran sebagai Juara II Desa Penerima PNPM Pariwisata Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013 |
| 9 | Penghargaan dari Kemenkokesra RI | Diberikan kepada salah satu anggota Pokdarwis (Sugeng Handoko) sebagai Juara II Lomba Menulis 1001 Jejak PNPM Mandiri Tingkat Nasional Tahun 2014 |

Sumber: gunungapipurba.com (2018)

Sebagai sebuah Desa Wisata yang cukup dikenal luas, Desa Nglanggeran menerapkan 3 (tiga) prinsip dasar dalam pengembangan desa wisatanya, yaitu (gunungapipurba.com, 2018):

1. Prinsip ramah lingkungan (Alam dan Budaya)

Hadirnya pengembangan pariwisata harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan baik alam dan budaya masyarakatnya. Jangan sampai hadirnya pariwisata justru malah menimbulkan kerusakan alam dan menggerus budaya dan kearifan lokal masyarakat. Termasuk tata kelola pengunjung dan daya dukung kawasan perlu menjadi perhatian.

2. Ramah masyarakat

Dalam proses perencanaan dan pengembangan menggunakan konsep partisipatif dan perencanaan dari bawah, sehingga keterlibatan masyarakat dan rasa memiliki akan tumbuh dengan baik. Termasuk dalam proses implementasi dan pendistribusian hasil dari kegiatan kepariwisataan diatur dengan baik. Selain itu hadirnya kegiatan kepariwisataan jangan sampai membuat masyarakat sebagai tuan rumah menjadi tidak nyaman, semuanya harus bahagia baik wisatawan maupun pemilik rumahnya yakni masyarakat di kawasan wisata tersebut.

3. Ramah Wisatawan

Wisatawan sebagai tamu harus diterima dengan baik, pelibatan masyarakat sebagai tuan rumah yang baik akan membuat wisatawan nyaman dan betah untuk aktivitas di Desa Wisata Nglanggeran. Guna peningkatan pelayanan dan pelayanan prima terhadap wisatawan kami lakukan juga berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM.

Untuk mengembangkan desa tersebut, Desa Nglanggeran bekerjasama dengan beberapa *stakeholder* yang begitu berpengaruh dalam untuk meningkatkan perkembangan pariwisata di desa tersebut. Dalam hal ini terdapat pola kerjasama di Desa Nglanggeran (gunungapipurba.com, 2018; Calzada, 2016), yang melibatkan 5 (lima) *stakeholder* dengan pola kerjasama yang dikenal dengan *Penta Helix* atau dikenal dengan rumusan *ABCGM* yaitu adanya keterlibatan Pemerintah, komunitas, Pembisnis, Media dan juga Akademisi. Hal tersebut dikarenakan *trend* serta era globalisasi yang semakin meluas dan keberadaan media juga sangat berpengaruh dalam pengembangan pariwisata untuk menarik minat wisatawan. Kolaborasi merupakan salah satu alternatif untuk menunjang sebuah perubahan dalam bentuk lintas Stakeholder (Bryson, 2006; Rondinelli, 2003).

Dari peraturan pemerintah, diketahui bahwa pengembangan pariwisata berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan sektor lain seperti sektor swasta dan publik memperhatikan tata pemerintahan yang baik. Secara teoritis, pengembangan sektor pariwisata yang melibatkan aktor-aktor non-negara dalam studi administrasi publik dikenal sebagai pemerintahan yang baik, menekankan kerjasama yang menguntungkan antara sektor publik dan swasta di bawah prinsip-prinsip yang baik (Zaenuri, 2015).

Pemerintah sebagai *stakeholder* pembuat kebijakan atau regulasi untuk daerah atau wilayah tertentu harus memperhatikan beberapa hal agar regulasi yang dibentuk tepat sasaran. Judisseno (2017) menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, khususnya dibidang pariwisata :

1. Pola koordinasi lintas organisasi,
2. Pola perencanaan terpadu yang mencakup semua aspek dalam kepariwisataan, seperti perencanaan infrastruktur pariwisata, promosi dan pemasaran wisata, perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), perencanaan lembaga atau badan atau otoritas yang mengurus kepariwisataan, dan perencanaan pengembangan, dan pembukaan destinasi wisata baru,
3. Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait dengan kepariwisataan agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lainnya, seperti antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan, Kementerian kebudayaan dan bahkan dengan Pemerintah daerah,
4. Keterlibatan pemerintah secara langsung dalam usaha kepariwisataan (government as tourism entrepreneur), seperti di bidang penerbangan, hotel, pengembangan SDM, promosi dan layanan lainnya,
5. Kebijakan yang terkait dengan pemberian stimulasi, seperti stimulasi keuangan, kemudahan berusaha, bantuan dana penelitian dibidang pariwisata dan promosi kepariwisataan.

Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang lebih menarik, Desa Nglanggeran melakukan kerjasama atau kolaborasi yang pada awalnya hanya terjadi antara internal pengelola seperti kepala dusun dan juga masyarakat sekitar, hal ini terjadi karena Desa Nglanggeran tersebut memiliki 5 (lima) dusun sehingga sangat memungkinkan untuk sebuah pengembangan.

Setelah muncul kelompok-kelompok masyarakat yang memperhatikan wisata di Desa Nglanggeran tersebut dan sekarang tergabung dalam wadah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dipelopori oleh salah satu pemuda di Desa Nglanggeran itu sendiri. Selanjutnya Desa Nglanggeran juga bekerjasama dengan Pemerintah baik di tingkat Desa itu sendiri, Kecamatan, Kabupaten dan juga Provinsi DIY.

Akademisi yang ikut bekerjasama dengan Desa Nglanggeran juga menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh untuk pengembangan Desa Nglanggeran. Hal itu dikarena pihak akademisi disini membantu mengkonsekapkan pariwisata itu sendiri, untuk itu Desa Nglanggeran sangat terbantu dengan adanya kolaborasi Pusat Pariwisata UGM dan juga UPN yang melihat kontur bebatuan Gunung Api Purba.

Desa Nglanggeran hanya mengembangkan usaha lokal dan pedagang-pedagang lokal untuk menunjang kebutuhan wisatawan yang sedang berkunjung. Segala bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Desa Nglanggeran adalah bentuk kesadaran dari kelompok masyarakat Desa Nglanggeran untuk menunjukkan potensi wisata yang desa mereka miliki. Seperti yang diungkapkan (Anshell dan Gash, 2007; Ines dan Booher, 2010) bahwa urgensi dari pemangku

kepentingan adalah dengan mengajak warga duduk bersama untuk mengambil keputusan publik adalah hasil perencanaan dan konsensus melalui proses dialog tatap muka secara demokratis.

Harapan terbentuknya *Penta Helix (ABCGM)* dan ditambah dengan dukungan dari wisatawan (+) merupakan adanya kerjasama yang terjadi diantara beberapa *stakeholder*, tetapi masih terlihat kurang adanya keterlibatan dari *stakeholder* tersebut. Seperti masih kurang jelasnya media apa yang memang bekerjasama dengan Desa Nglanggeran untuk mempromosikan keindahan paariwisata desa wisata tersebut. Sama halnya dengan akadimisi yang turut bekerjasama untuk pengembangan pariwisata tersebut. Kesimpang siuran informasi terkait kerjasama yang dilakukan oleh beberapa *stakeholder* tersebut yang mendasari penulis untuk meneliti terkait kolaborasi *ABCGM+* dalam pengembangan Pariwisata di Desa tersebut. Bagaimana sesungguhnya peran dari ke-enam *stakeholder* tersebut, lalu *stakeholder* mana saja yang berkontribusi paling besar atau menonjol dalam pengembangan tersebut. Untuk itulah penulis ingin menganalisis kolaborasi *ABCGM+* dalam pengembangan pariwisata di Desa Nglaggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah :

- 1.2.1 Bagaimana Peran Dari Masing-Masing Stakeholder *ABCGM+* dalam Pengembangan Pariwisata Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018 ?
- 1.2.2 Bagaimana Kolaborasi *ABCGM+* dalam Pengembangan Pariwisata Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Peran Dari Masing-Masing Stakeholder *ABCGM+* dalam Pengembangan Pariwisata Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Kolaborasi *ABCGM+* Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
 - 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu serta pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan terkait kolaborasi *ABCGM+* dalam pengembangan pariwisata.
 - 1.4.1.2 Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
 - 1.4.1.3 Hasil penelitian ini juga dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada pembaca terkait bagaimana kolaborasi

ABCGM+ dalam pengembangan pariwisata dan juga memberikan gambaran bagaimana seharusnya mengembangkan pariwisata dengan mempertimbangkan dari beberapa aspek dan juga dari beberapa *stakeholder*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Salah satu upaya untuk mengetahui bentuk kerjasama *ABCGM+* yang terjalin dalam pengembangan pariwisata

1.4.2.2 Sebagai sebuah usaha untuk mengetahui tantangan serta hambatan dalam pengembangan pariwisata.

1.4.2.3 Sebagai bahan acuan untuk pengembangan pariwisata selanjutnya di Desa Nglanggeran.